

MODUL

Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Iran

BAB III

Pengantar Bab 3 – Struktur Pemerintahan Kuno Iran

Mata kuliah Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Iran pada Bab 3 ini mengajak mahasiswa untuk menelusuri fondasi pemerintahan yang membentuk identitas politik Persia kuno. Tiga kekaisaran besar—Achaemenid, Parthia, dan Sasanid—menjadi fokus utama dalam memahami bagaimana konsep kekuasaan, administrasi wilayah, dan hubungan antara negara dengan agama dirancang dan dijalankan selama lebih dari satu milenium.

Kekaisaran Achaemenid memperkenalkan sistem satrapi yang efisien, jaringan jalan yang luas, serta simbolisme kekuasaan raja sebagai wakil ilahi. Parthia mengembangkan sistem feodal yang lebih longgar namun tetap stabil secara militer dan sosial. Sementara itu, Sasanid menunjukkan bentuk sentralisasi kekuasaan yang kuat, dengan hubungan erat antara pemerintahan dan agama Zoroaster, serta sistem hukum dan perpajakan yang terstruktur.

Pemahaman terhadap sistem-sistem ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah Persia, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana warisan politik dan administratif Persia turut memengaruhi struktur pemerintahan di dunia Islam serta relevansinya dengan konsep kekuasaan modern.

Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengkritisi konsep kekuasaan Persia, memahami warisannya dalam peradaban Islam, serta mengaitkan model pemerintahan kuno dengan dinamika administrasi kontemporer.

Struktur Pemerintahan Kuno Iran: Awal Supremasi Persia di Dunia Kuno

Sejarah struktur pemerintahan Iran kuno tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan kekuasaan Persia di wilayah Timur Dekat sejak abad ke-6 SM. Keberhasilan bangsa Persia membentuk kekaisaran global pertama dalam sejarah dunia tidak hanya mencerminkan kekuatan militer, tetapi juga kematangan administratif dan tata kelola pemerintahan yang sistematis. Momen krusial ini menandai dimulainya supremasi Iran dalam kancan politik dan peradaban kuno.

Sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber Asyur dan sejarawan seperti Herodotus, ekspansi awal Persia diawali oleh suku Media (Medes) yang terlebih dahulu membentuk kekuatan di perbatasan utara Mesopotamia. Suku Media menaklukkan kota-kota besar seperti Niniveh dan Assur, serta memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke Anatolia bagian timur. Namun, tongkat kekuasaan segera berpindah ke tangan bangsa Persia melalui tokoh kunci: Cyrus II dari Anshan, yang pada sekitar tahun 550 SM mengalahkan Astyages, raja Media, dan memulai ekspansi besar-besaran.

Kejayaan Cyrus tidak berhenti di situ. Ia menaklukkan Lydia (Sardis) di Asia Kecil, kemudian menguasai Babilonia pada 539 SM. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa penyerahan kota Babilonia dilakukan tanpa pertempuran besar, menunjukkan adanya dukungan internal dari elite lokal terhadap pemerintahan baru Persia. Dengan cepat, kekaisaran ini mengintegrasikan berbagai wilayah dan bangsa ke dalam satu sistem pemerintahan yang koheren, yang nantinya dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenid.

Dinasti Achaemenid: Asal Usul, Struktur Pemerintahan, dan Warisan Peradaban

Sejarah Iran Kuno mencapai salah satu puncak kejayaan globalnya melalui Dinasti Achaemenid, kekaisaran besar yang bukan hanya luas secara geografis, namun juga mendalam secara politik dan budaya. Berdiri pada pertengahan abad ke-6 SM, kekaisaran ini mencerminkan sintesis antara nilai-nilai politik lokal dan ide-ide universal tentang kekuasaan dan tata kelola.

Dan bangsa yang membentuk Dinasti Achaemenid berasal dari rumpun Indo-Iran, cabang dari kelompok Indo-Eropa yang bermigrasi dari daerah stepa Eurasia menuju Dataran Tinggi Iran sekitar 1500 SM. Mereka menyebut diri mereka Arya (yang berarti "mulia" atau "bangsawan"), dan dari sanalah nama Iran berasal—Eran-shahr, atau "Tanah Orang Arya."

Mereka membawa serta bahasa Indo-Iran, struktur sosial kesukuan, dan fondasi kepercayaan spiritual yang kemudian berkembang menjadi Zoroastrianisme, agama yang kelak menjadi ideologis bagi kekuasaan Persia, terutama pada era Sasanid. Identitas Arya ini bukan sekadar ras, melainkan simbol budaya, nilai etis, dan visi tentang pemerintahan yang sah secara spiritual dan moral.

Berdirinya Dinasti Achaemenid dan Tokoh-Tokohnya

Dinasti Achaemenid didirikan oleh Cyrus II (Cyrus Agung) pada tahun 550 SM setelah mengalahkan Raja Astyages dari Media. Dalam waktu singkat, Cyrus berhasil menaklukkan Lydia di barat, Babilonia di selatan, dan membangun kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner dan toleran—tercermin dalam Cyrus Cylinder, dokumen kebebasan beragama dan hak asasi manusia paling awal yang pernah ditemukan.

Penerusnya, Cambyses II, menaklukkan Mesir, memperluas wilayah kekuasaan Persia hingga ke Afrika Utara. Namun peran paling signifikan dalam membangun sistem pemerintahan justru dilakukan oleh Darius I (Darius Agung). Ia menyusun sistem satrapi yang membagi kekaisaran ke dalam provinsi-provinsi (satrapi) dengan pengawasan administratif yang rapi. Darius juga memperkenalkan sistem perpajakan, hukum seragam, serta membangun Royal Road untuk mempercepat komunikasi dan perdagangan antar wilayah.

Xerxes I, putra Darius, dikenal luas karena invasinya ke Yunani, termasuk Pertempuran Thermopylae dan Salamis. Meski gagal menaklukkan Yunani sepenuhnya, pemerintahannya menandai puncak kebesaran kultural Achaemenid dan awal dari perlawanan terbuka dari dunia Barat.

Struktur Pemerintahan dan Administrasi

Kekaisaran Achaemenid dibangun atas dasar keseimbangan antara sentralisasi kekuasaan raja dan kebebasan lokal di tingkat satrapi. Raja dianggap sebagai sosok berkarisma ilahi (khvarenah) yang menerima restu dari Ahura Mazda. Pemerintah pusat mengatur kebijakan umum, pertahanan, dan pengumpulan pajak, sementara satrap memiliki kebebasan untuk mengelola rakyatnya selama tetap setia kepada raja agung.

Achaemenid juga menerapkan multibahasa dan multibudaya dalam praktik pemerintahannya. Bahasa Aram digunakan sebagai bahasa administrasi resmi di seluruh kekaisaran, sementara bahasa Persia Kuno digunakan dalam prasasti-prasasti resmi. Sistem komunikasi yang canggih, termasuk pos berkuda, memungkinkan surat menyurat dari ujung ke ujung kekaisaran hanya dalam hitungan hari.

Sistem Satrapi dan Sentralisasi Terbatas

Struktur pemerintahan Achaemenid berporos pada pembagian wilayah ke dalam satrapi, yakni unit administrasi semi-otonom yang dipimpin oleh satrap atau gubernur kerajaan. Satrapi ini pada masa Darius I mencapai lebih dari 20, dengan masing-masing mencerminkan kondisi geografis, demografis, dan budaya lokal. Setiap satrap memiliki tanggung jawab untuk:

Mengumpulkan pajak dan mengirimkannya ke pusat.

Menyediakan pasukan ketika diperlukan.

Menjaga keamanan wilayah dan menegakkan hukum.

Namun, agar kekuasaan satrap tidak berubah menjadi dinasti lokal yang otonom, kerajaan menetapkan sistem pengawasan yang ketat. Tidak ada satu orang pun yang memiliki otoritas absolut dalam satu satrapi, karena kekuasaan militer, fiskal, dan administratif dipisahkan secara ketat dan dikontrol oleh pejabat yang berbeda.

Mekanisme Checks and Balances

Sistem pengawasan internal Achaemenid cukup kompleks dan bersifat kolektif. Beberapa lembaga kunci yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat provinsi antara lain:

- Sekretaris Kerajaan (Dabira): Bertugas mengawasi dan melaporkan langsung kepada raja mengenai dokumen, pengeluaran, dan komunikasi administratif dari satrapi.
- Bendahara Kerajaan: Mengontrol arus keuangan dan distribusi sumber daya di setiap satrapi.
- Komandan Garnisun: Kepala militer wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada raja, bukan kepada satrap.
- “Mata dan Telinga Raja” (Kaspiša): Agen intelijen rahasia kerajaan yang bertugas melakukan inspeksi mendadak dan melaporkan kondisi satrapi kepada pusat secara independen.

Sistem ini menggabungkan prinsip desentralisasi administratif dengan kontrol sentral melalui pengawasan hierarkis dan informasi langsung ke pusat kekuasaan.

Bahasa dan Komunikasi Administratif

Bahasa Aram dijadikan sebagai bahasa administratif utama di seluruh kekaisaran karena kesederhanaannya dan jangkauan luasnya dalam komunikasi antarwilayah. Bahasa ini digunakan dalam dokumen resmi, pengumuman publik, dan surat menyurat antarsatrapi. Di sisi lain, prasasti resmi seperti di Behistun tetap menggunakan bahasa Persia Kuno, Elam, dan Babilonia, yang menunjukkan simbol kekuasaan dan legitimasi multibahasa.

Untuk memperlancar komunikasi, Achaemenid membangun sistem pos kerajaan yang efisien, termasuk Royal Road yang menghubungkan Susa dan Sardis. Utusan kerajaan dapat menyampaikan pesan melintasi ribuan kilometer hanya dalam beberapa hari berkat stasiun pengganti kuda dan tempat perhentian logistik.

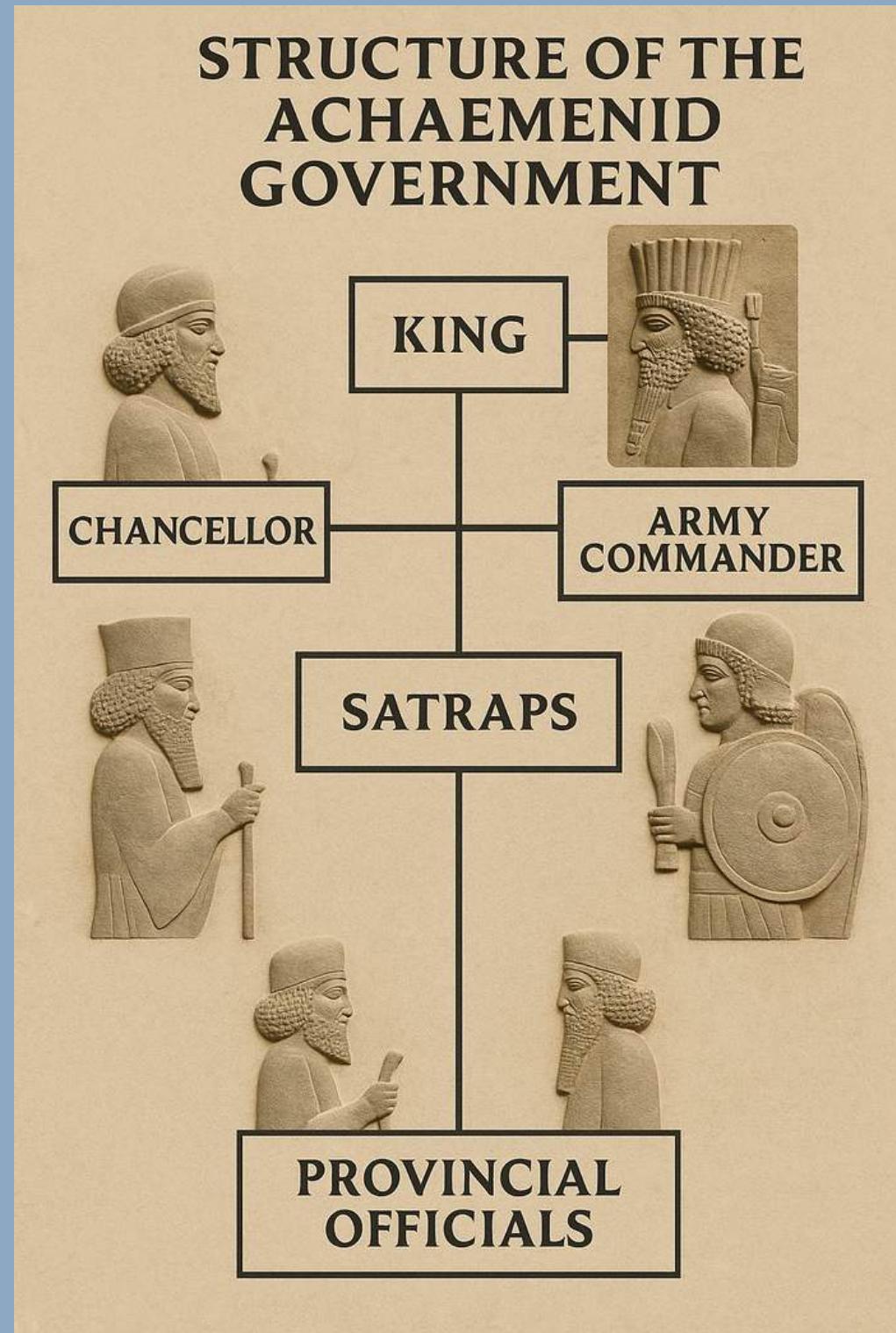
Institusi Pendukung dan Arsip Persepolis

Bukti paling konkret dari struktur administratif Achaemenid ditemukan dalam arsip Fortifikasi Persepolis, yakni ribuan tablet tanah liat dalam bahasa Elam dan Aram yang mencatat distribusi ransum, pergerakan pejabat, logistik kerajaan, dan daftar tenaga kerja. Arsip ini menunjukkan keberadaan sistem administrasi yang canggih dengan pembukuan, pembagian kerja, serta pemantauan sumber daya secara detail dan konsisten.

Warisan Administratif dalam Sejarah Dunia

Kekaisaran Achaemenid mewariskan model birokrasi yang seimbang antara sentralisasi kekuasaan dan pengakuan atas keragaman lokal. Model ini kemudian diadopsi oleh kekaisaran lain:

- Romawi mengembangkan bentuk provincia yang mirip dengan satrapi.
- Kekhalifahan Islam mengadopsi struktur administrasi Persia, termasuk penggunaan istilah seperti diwan.
- Struktur pajak dan catatan logistik dalam dunia Islam juga meniru sistem pembukuan Achaemenid.



Bagan ini menggambarkan struktur hierarkis pemerintahan Kekaisaran Achaemenid yang dibangun untuk mengelola wilayah yang sangat luas dan multietnis secara efisien dan stabil. Sistem ini memperlihatkan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan otonomi wilayah.

1. KING (RAJA)

Raja merupakan pusat dari seluruh struktur kekuasaan. Ia dipandang memiliki khvarenah (karisma ilahi) dan menjadi pemegang otoritas tertinggi atas urusan politik, militer, hukum, dan spiritual. Semua elemen pemerintahan berada di bawah kekuasaannya secara langsung.

2. CHANCELLOR (SEKRETARIS KERAJAAN)

Bertugas mengelola urusan administrasi pusat, termasuk dokumentasi resmi, komunikasi antara pusat dan daerah, serta pengawasan birokrasi. Ia berperan penting dalam memastikan kelancaran administrasi kekaisaran.

3. ARMY COMMANDER (KOMANDAN MILITER)

Komandan garnisun atau militer yang ditempatkan di setiap wilayah satrapi. Ia tidak berada di bawah wewenang satrap melainkan langsung melapor kepada raja. Hal ini menjadi mekanisme kontrol agar tidak terjadi kudeta atau penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.

4. SATRAPS (GUBERNUR PROVINSI)

Satrap memimpin masing-masing provinsi (satrapi). Ia bertanggung jawab atas pemungutan pajak, pelaksanaan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Meskipun memiliki otonomi administratif, satrap tetap diawasi langsung oleh raja dan pejabat kerajaan lainnya.

5. PROVINCIAL OFFICIALS (PEJABAT PROVINSI)

Pejabat-pejabat pendukung satrap, seperti bendahara, hakim, dan kepala keamanan. Mereka menjalankan fungsi administratif sehari-hari serta menjadi penghubung langsung antara pemerintah daerah dan pusat.

Daftar Raja Achaemenid dan Kontribusi Pemerintahannya

Cyrus II (Cyrus the Great) 559–530 SM

- Mendirikan Kekaisaran Achaemenid
- Menyatukan bangsa Persia dan Media
- Menciptakan Charter of Human Rights (silinder Cyrus)
- Memulai sistem satrapi dan toleransi keagamaan

Cambyses II 530–522 SM

- Menaklukkan Mesir
- Memperluas sistem pemerintahan Persia ke wilayah baru
- Mengawali diplomasi internasional dan badan intelijen awal

Darius I (Darius the Great) 522–486 SM

- Reformasi administratif skala besar
- Menetapkan sistem pajak, hukum, dan satrapi formal
- Mendirikan Royal Road dan sistem pos
- Mengembangkan sistem mata-mata kerajaan (King's Eyes and Ears)
- Meresmikan Zoroastrianisme sebagai agama negara

Xerxes I 486–465 SM

- Melanjutkan birokrasi dan proyek infrastruktur Darius I
- Menerapkan strategi globalisasi administratif melalui kampanye militer ke Yunani
- Memperkuat logistik dan pembagian wilayah militer

Artaxerxes I 465–424 SM

- Meneruskan sistem pemerintahan yang stabil
- Menghadapi pemberontakan internal dan eksternal dengan kekuatan administratif

Darius II (Nothus) 423–404 SM

- Pemerintahan diwarnai konflik keluarga
- Mempertahankan stabilitas birokrasi melalui pengaruh Parysatis dan memperkuat dinasti lewat putranya

Artaxerxes II 404–358 SM

- Menjaga kesinambungan birokrasi di tengah persaingan dengan Yunani dan Mesir
- Mengelola kekaisaran di masa penuh tekanan diplomatik

Artaxerxes III 358–338 SM

- Melakukan sentralisasi ulang dan menundukkan kembali Mesir
- Memperkuat kekuasaan raja pusat terhadap satrap

Darius III 336–330 SM

- Raja terakhir Achaemenid
- Kekaisaran jatuh ke tangan Alexander Agung
- Pemerintahannya menunjukkan kegagalan reformasi saat menghadapi invasi Makedonia

CATATAN

- 1 Darius I merupakan tokoh kunci dalam pembentukan sistem pemerintahan Kekaisaran Achaemenid. Ia menetapkan struktur satrapi, sistem pajak terstandar, jalur komunikasi Royal Road, serta sistem pengawasan pusat terhadap daerah. Hampir seluruh perangkat birokrasi Persia pasca-Cyrus dibentuk dan dikodifikasi pada masa pemerintahannya.
- 2 Cyrus Agung (Cyrus II) meletakkan dasar ideologis dan etis bagi kekuasaan Persia. Pendekatannya yang humanistik—tercermin dalam Piagam Hak Asasi Manusia (Silinder Cyrus)—menekankan pada perlindungan hak rakyat, toleransi agama, dan persatuan etnis. Kontribusi Cyrus bersifat filosofis dan normatif, menjadi fondasi moral bagi pemerintahan yang dibangun oleh Darius.
- 3 Xerxes I membawa model administrasi Persia ke skala global. Dengan mengintegrasikan pasukan dari lebih 50 bangsa, membangun jembatan dan gudang logistik lintas benua, serta menyusun strategi komunikasi militer global, ia menciptakan cikal bakal integrasi pemerintahan multinasional dan sistem globalisasi awal.

Dari Achaemenid ke Parthia: Transisi Kekuasaan dan Kebangkitan Lokal

1 Keagungan Achaemenid dan Kejatuhannya

Kekaisaran Achaemenid (550–330 SM), yang didirikan oleh Cyrus Agung dan dimatangkan oleh Darius I, menjadi model kekaisaran pertama yang sukses memadukan sistem birokrasi terpusat, toleransi agama, serta jaringan komunikasi dan logistik yang sangat maju (misalnya Royal Road dan sistem satrapi). Namun, kekuasaan ini akhirnya runtuh pada tahun 330 SM akibat penaklukan militer oleh Aleksander Agung dari Makedonia.

Meskipun kekaisaran hancur secara politis, warisan administratif dan budaya Achaemenid tidak sepenuhnya lenyap. Sistem satrapi, struktur pajak, penggunaan Aram sebagai bahasa administratif, dan semangat otonomi regional tetap tertanam dalam memori politik wilayah Iran.

2 Pemerintahan Helenistik dan Kekosongan Kekuasaan di Timur

Setelah Aleksander wafat pada 323 SM, wilayah bekas Achaemenid dibagi-bagi oleh para jenderalnya. Kawasan Iran berada di bawah kendali Dinasti Seleukid, sebuah dinasti Helenistik yang berusaha memaksakan sistem budaya dan administrasi Yunani ke atas masyarakat lokal yang sebelumnya hidup di bawah sistem Persia.

Namun, kontrol Seleukid atas wilayah timur Iran sangat lemah. Satrapi-satrapi seperti Bactria, Media, dan Parthava (Parthia) jauh dari pusat kekuasaan Seleukid dan mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Bangkitnya raja-raja lokal dan pemberontakan satrapi adalah hasil langsung dari ketidakpuasan terhadap dominasi Helenistik dan marginalisasi elit lokal.

3 Kebangkitan Parthia: Pewaris Lokal Kekaisaran Timur

Dalam konteks inilah muncul bangsa Parni, sebuah suku nomaden dari konfederasi Dahae, yang bermigrasi ke wilayah Parthava. Mereka dipimpin oleh Arsaces I, yang pada sekitar 247 SM berhasil mengalahkan satrap Seleukid setempat dan memproklamirkan kemerdekaan. Arsaces dan para penerusnya tidak memaksakan sistem baru yang asing. Sebaliknya, mereka mengadopsi banyak aspek pemerintahan Achaemenid, seperti:

Sistem satrapi (provinsi semi-otonom),

Gelar "Shahanshah" (Raja dari Raja),

Simbol-simbol kekuasaan Persia seperti tiara kerajaan dan pemujaan terhadap api,

Serta toleransi budaya dan agama yang luas.

The Growth of Parthia

Sumber: Neilson C. Debevoise, A Political History of Parthia, University of Chicago Press, 1938.

Bab ini membahas asal-usul bangsa Parthia dengan menekankan bahwa informasi mengenai identitas rasial mereka masih bersifat spekulatif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya catatan tertulis asli dari masa awal Parthia, serta terbatasnya data arkeologis dan antropologis yang dapat diandalkan. Sisa-sisa kerangka manusia yang ditemukan di wilayah Mesopotamia tidak cukup memberikan informasi karena mencerminkan populasi yang bercampur, termasuk unsur lokal, Yunani, Makedonia, bahkan mungkin India dan Cina.

Potret-potret raja Parthia yang muncul dalam mata uang koin pun tidak membantu, karena penggambaran yang seragam—berjanggut lebat dan tanpa detail wajah yang khas—tidak memungkinkan identifikasi fisik yang akurat. Bahasa yang digunakan oleh orang Parthia juga tidak mengungkap asal-usul mereka, karena mereka mengadopsi bahasa-bahasa administratif yang sudah ada sebelumnya, seperti Persia dan Yunani.

Debevoise menyatakan bahwa sebagian besar sumber sejarah tentang Parthia berasal dari penulis-penulis Yunani dan Romawi, yang umumnya memiliki pandangan negatif atau bias terhadap Parthia karena latar belakang konflik militer. Ini menyulitkan pembentukan narasi sejarah yang objektif dan representatif dari sudut pandang internal Parthia.

Penulis menyimpulkan bahwa Parthia sebagai entitas politik muncul bukan dari satu identitas etnis yang homogen, melainkan dari campuran budaya dan etnik. Identitas mereka lebih ditentukan oleh dinamika politik dan militer daripada oleh warisan rasial yang dapat ditelusuri secara pasti.

Kemajuan Kekaisaran Parthia

(Disarikan dari karya Neilson C. Debevoise, *A Political History of Parthia*, University of Chicago Press, 1938)

Kekaisaran Parthia (247 SM – 224 M), yang didirikan oleh bangsa Parni dan dipimpin oleh Dinasti Arsacid, mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan diplomasi. Kemajuan ini merupakan hasil dari konsolidasi internal dan pengaruh eksternal yang dikelola dengan adaptif.

Konsolidasi Kekuasaan dan Wilayah

Parthia mengalami ekspansi besar di bawah raja Mithridates I (memerintah sekitar 171–138 SM), yang berhasil menaklukkan Media, Babilonia, dan wilayah penting lainnya yang sebelumnya dikuasai oleh Seleukid. Keberhasilan ini menandai transformasi Parthia dari kerajaan lokal menjadi kekuatan regional yang dominan di Iran dan Mesopotamia.

Stabilitas Politik dan Administrasi

Setelah kematian Mithridates I, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Phraates II. Meskipun naik takhta dalam usia muda, pemerintahan tetap berlangsung stabil dengan bantuan wali. Catatan kuneiform dari Babilonia menunjukkan bahwa Parthia mampu mempertahankan sistem administrasi yang terorganisasi, serta mencetak koin dengan simbol-simbol kekuasaan. Hal ini menandakan bahwa negara tetap berfungsi sebagai institusi politik yang sah dan stabil di mata rakyat dan elit lokal.

Penguasaan Ekonomi dan Infrastruktur

Wilayah Parthia melintasi Jalur Sutra kuno, yang menjadi tulang punggung perdagangan antara Timur dan Barat. Parthia memanfaatkan posisi ini dengan menjamin keamanan kafilah dagang dan mengenakan pajak atas lalu lintas barang, terutama sutra dari Tiongkok ke Mediterania. Peninggalan arkeologis dan numismatik (koin) menunjukkan tingkat integrasi ekonomi yang cukup tinggi, terutama di kota-kota seperti Seleucia dan Ctesiphon.

Militer dan Taktik Perang

Parthia terkenal karena penggunaan kavaleri berat dan ringan, serta taktik militer khas yang dikenal sebagai "Parthian shot"—menyerang musuh dengan panah sambil berpura-pura mundur. Kekuatan militer inilah yang memungkinkan Parthia bertahan dari serangan Romawi dan menjaga batas barat kekaisaran selama berabad-abad.

Hubungan Diplomatik dan Keseimbangan Regional

Parthia mampu mempertahankan kedaulatannya dalam menghadapi dua kekuatan besar pada zamannya: Romawi di barat dan Kushan di timur. Strategi diplomasi Parthia mencakup pernikahan politik, pengakuan ganda terhadap raja (diakui secara lokal dan internasional), serta pengelolaan wilayah-wilayah semi-otonom.

Bagaimana Parthia Berubah Menjadi Sasanid?

1. Parthia Mulai Lemah

Parthia (Dinasti Arsacid) sudah memerintah Iran sejak lama, tapi:

Kekuasaan rajanya lemah dan tidak bisa mengontrol bangsawan-bangsawan lokal.

Banyak perang saudara dan konflik antar elite.

Romawi sering menyerang wilayah barat Iran.

Rakyat di selatan Iran merasa tidak puas dan mulai memberontak.

2. Muncul Tokoh Baru: Ardashir I

Di bagian selatan Iran (di daerah Fars), ada seorang pemimpin kecil bernama Pabag.

Anaknya, Ardashir I, semakin berani. Ia merebut kota-kota kecil satu per satu.

Setelah cukup kuat, dia menantang langsung Raja Parthia, yaitu Artabanus IV.

3. Perang Besar Tahun 224 M

Ardashir dan Artabanus bertempur di daerah bernama Hormozgan.

Hasilnya: Artabanus tewas dan Ardashir menang besar.

Saat itulah Dinasti Parthia berakhir, dan Dinasti Sasanid dimulai.

4. Apa yang Dilakukan Ardashir Setelah Menang?

Ia mengangkat dirinya sebagai Shahanshah (artinya: "Raja dari segala raja").

Ia meniru dan melanjutkan gaya pemerintahan Achaemenid, dinasti besar Persia zaman dulu (Cyrus & Darius).

Ardashir juga menjadikan agama Zoroaster sebagai agama resmi negara.

Pemerintahannya lebih terpusat, artinya semua kekuasaan ada di tangan raja, tidak dibagi-bagi ke bangsawan lokal seperti di masa Parthia.

5. Kenapa Ini Penting?

Ardashir mengubah Iran dari sistem feodal (bangsawan-bangsawan kuat) ke sistem kerajaan yang kuat dan terpusat. Ia juga menciptakan identitas nasional Persia yang lebih rapi dan teratur.

Ciri Khas dan Hal Paling Menonjol dari Dinasti Sasanid

1. Sentralisasi Kekuasaan

Sasanid menghapus sistem bangsawan bebas ala Parthia.

Raja (Shahanshah) punya kekuasaan absolut atas seluruh negeri—baik sipil, militer, maupun agama.

Kekuasaan raja dijustifikasi secara religius: dianggap sebagai wakil Ahura Mazda.

2. Zoroastrianisme sebagai Agama Negara

Pertama kalinya dalam sejarah Iran, agama resmi negara diterapkan secara sistematis.

Para pendeta Zoroaster (Mobedan) punya posisi tinggi dalam pemerintahan. Hukum agama dan hukum negara disatukan.

Muncul pengawasan moral, sensus agama, dan bahkan penganiayaan terhadap kelompok lain (Kristen, Manichaeans, dll).

3. Militer Elite dan Musuh Romawi

Sasanid membangun sistem militer kuat, terutama pasukan Savārān (kavaleri elit).

Jadi musuh utama Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) selama berabad-abad.

Benteng-benteng perbatasan dan strategi militer mereka menjadi contoh kekuatan militer kuno yang hebat.

4.  **Sistem Birokrasi yang Terorganisasi**
Dīwān (kementerian) mengelola keuangan, perpajakan, militer, sensus.
Ada catatan penduduk dan sistem pajak terstruktur.
Ini menjadi model bagi Kekhalifahan Islam setelahnya (Umayyah & Abbasiyah menirunya).
5.  **Budaya, Arsitektur, dan Sastra**
Peninggalan seperti relief batu Naqsh-e Rustam, istana Ctesiphon, dan seni logam menunjukkan kemegahan artistik.
Banyak cerita kepahlawanan dan sejarah yang nanti masuk dalam epos Persia Shahnameh berasal dari era ini.
Bahasa Pahlavi berkembang sebagai bahasa resmi dan kesusastraan.
6.  **Warisan untuk Dunia Islam**
Banyak sistem administrasi, hukum, dan tata negara Sasanid diadopsi oleh kekhalifahan Islam.
Beberapa penasihat, juru tulis, dan intelektual Persia ikut membentuk sistem pemerintahan Islam awal.